



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 714);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2020 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2020 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521);

28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 491);
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
3. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
4. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah provinsi, Bupati bagi Daerah kabupaten, atau Wali kota bagi Daerah kota.
17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp8.342.203.125.430,42 yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp4.936.497.456.098,42 yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.344.116.899.379,00.
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp341.156.842.200,00.
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp584.820.361.218,42.
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp666.403.353.301,00.

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp3.344.116.899.379,00. yang terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan (PAP);
 - e. Pajak Rokok;
 - f. Pajak Alat Berat.
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000.000,00.
- (3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp710.000.000.000,00.
- (4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp890.000.000.000,00.
- (5) Pajak Air Permukaan (PAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00.
- (6) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp735.616.899.379,00.
- (7) Pajak Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00.

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000.000,- yang terdiri atas:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Penumpang sedan direncanakan sebesar Rp19.751.930.000,00.
 - b) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Penumpang-Jeep direncanakan sebesar Rp84.205.000.000,00.

- c) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Penumpang-Minibus direncanakan sebesar Rp415.088.375.000,00.
 - d) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Bus-Microbus direncanakan sebesar Rp2.417.675.000,00.
 - e) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Bus-Bus direncanakan sebesar Rp905.571.000,00.
 - f) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Barang/Beban-Pick Up direncanakan sebesar Rp 81.058.975.000,00.
 - g) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Barang/Beban-Light Truck direncanakan sebesar Rp 100.815.881.000,00.
 - h) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Barang/Beban-Truck direncanakan sebesar Rp 73.764.251.000,00.
 - i) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Barang/Beban-Blind Van direncanakan sebesar Rp1.827.595.000,00.
 - j) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua direncanakan sebesar Rp220.003.782.000,00.
 - k) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga direncanakan sebesar Rp145.090.000,00.
 - l) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Roda Tiga direncanakan sebesar Rp15.875.000,00.
- (2) Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp710.000.000.000,00. yang terdiri atas:
- a) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Penumpang Sedan direncanakan sebesar Rp2.859.000.000,00.
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Penumpang Jeep direncanakan sebesar Rp57.250.000.000,00.
 - c) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Penumpang Minibus direncanakan sebesar Rp241.900.000.000,00.
 - d) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Penumpang Micro Bus direncanakan sebesar Rp1.656.000.000,00.
 - e) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Bus-Bus direncanakan sebesar Rp546.900.000,00.
 - f) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Barang/Beban Pick Up direncanakan sebesar Rp74.632.700.000,00.
 - g) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Barang/Beban Light Truck direncanakan sebesar Rp28.895.000.000,00.
 - h) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Barang/Truck direncanakan sebesar Rp25.843.300.000,00.
 - i) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Barang/Beban Blind Van direncanakan sebesar Rp3.775.300.000,00.
 - j) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Sepeda Motor Roda Dua direncanakan sebesar Rp270.142.600.000,00.
 - k) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Sepeda Motor Roda Tiga direncanakan sebesar Rp2.333.500.000,00.
 - l) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Roda Tiga direncanakan sebesar Rp165.700.000,00.
- (3) Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-Bahan Bakar Gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp890.000.000.000,- yang terdiri atas:
- a) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Bahan Bakar Bensin direncanakan sebesar Rp461.499.313.869,00.
 - b) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Bahan Bakar Solar direncanakan sebesar Rp428.500.686.131,00.

- (4) Anggaran Pajak Air Permukaan (PAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00. yang terdiri atas:
 - a) Pajak Air Permukaan direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00.
- (5) Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp735.616.899.379,00. yang terdiri atas:
 - a) Pajak Rokok direncanakan sebesar Rp735.616.899.379,00.
- (6) Anggaran Pajak Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00. yang terdiri atas:
 - b) Pajak Alat Berat direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00.

Pasal 7

- (1) Anggaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp341.156.842.200,00. yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp323.614.698.180,00.
 - b. Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp17.447.144.020,00.
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp95.000.000,00.
- (2) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp584.820.361.218,42 yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) direncanakan sebesar Rp149.703.861.218,42.
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) direncanakan sebesar Rp435.116.500.000,00.
- (3) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp666.403.353.301,00. yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp595.243.000.000,00.
 - b. Jasa Giro direncanakan sebesar Rp28.782.362.007,00.
 - c. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah direncanakan sebesar Rp194.351.033,00.
 - d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan direncanakan sebesar Rp422.953.760,00.
 - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp24.378.412.782,00.
 - f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp10.000.000,00.
 - g. Pendapatan dari Pengembalian direncanakan sebesar Rp17.372.273.719,00.

Pasal 8

- Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.391.919.009.597,00. yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pasal 9

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp3.354.664.317.597,00. yang terdiri atas:

- (1) Anggaran Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp3.339.582.362.597,00. yang diuraikan atas:
 - a. Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp160.121.214.597,00.
 - b. Anggaran Dana Alokasi Umum direncanakan sebesar Rp2.041.221.164.000,00.
 - c. Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik direncanakan sebesar Rp267.357.679.000,00.
 - d. Anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik direncanakan sebesar Rp870.882.305.000,00.
 - e. Anggaran Insentif Fiskal direncanakan sebesar Rp15.081.955.000,00.
- (2) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp37.254.692.000,00.

Pasal 10

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp13.786.659.735,00. yang terdiri atas:

- a. Anggaran Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri direncanakan sebesar Rp3.673.080.000,00.
- b. Anggaran Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis direncanakan sebesar Rp10.113.579.735,00.

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp8.333.594.479.430,42 yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga;
- d. Belanja Transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp5.364.664.934.696,46 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.501.009.958.952,18.
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.011.908.858.947,28.
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.

- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00.
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp846.615.926.797,00.
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.130.190.000,00.

Pasal 13

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.501.009.958.952,18 yang terdiri atas:

- a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp 1.446.398.720.098,18.
- b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp358.380.979.541,00.
- c) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN direncanakan sebesar Rp422.099.822.374,00.
- d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp70.998.297.470,00.
- e) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp2.835.840.285,00.
- f) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp7.836.746.184,00.
- g) Belanja Pegawai BOS direncanakan sebesar Rp86.771.735.000,00.
- h) Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp105.687.818.000,00.

Pasal 14

Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.446.398.720.098,18 yang terdiri atas:

- a) Belanja Gaji Pokok ASN direncanakan sebesar Rp1.106.699.572.131,26.
- b) Belanja Tunjangan Keluarga ASN direncanakan sebesar Rp106.436.164.159,00.
- c) Belanja Tunjangan Jabatan ASN direncanakan sebesar Rp12.274.331.980,00.
- d) Belanja Tunjangan Fungsional ASN direncanakan sebesar Rp70.228.833.967,00.
- e) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN direncanakan sebesar Rp16.023.126.527,00.
- f) Belanja Tunjangan Beras ASN direncanakan sebesar Rp54.986.096.061,00.
- g) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN direncanakan sebesar Rp3.545.684.503,00.
- h) Belanja Pembulatan Gaji ASN direncanakan sebesar Rp7.439.022.398,92
- i) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN direncanakan sebesar Rp57.555.000.000,-
- j) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan ASN direncanakan sebesar Rp1.740.000.000,-
- k) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN direncanakan sebesar Rp5.065.000.000,00.
- l) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan ASN direncanakan sebesar Rp4.405.888.371,00.

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp358.380.979.541,00. yang terdiri atas:
 - a) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN direncanakan sebesar Rp355.647.420.649,00.
 - b) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN Kondisi Kerja ASN direncanakan sebesar Rp132.025.000,00.
 - c) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN direncanakan sebesar Rp1.522.013.892,00.
 - d) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN direncanakan sebesar Rp1.079.520.000,00.
- (2) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp422.099.822.374,00. yang terdiri atas:
 - a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp78.353.963.080,00.
 - b) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD direncanakan sebesar Rp324.027.455.000,00.
 - c) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD direncanakan sebesar Rp440.695.000,00.
 - d) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD direncanakan sebesar Rp1.927.161.000,00.
 - e) Belanja Honorarium direncanakan sebesar Rp17.350.548.294,00.
- (3) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp70.998.297.470,00. yang terdiri atas:
 - a) Belanja Uang Refresentasi DPRD direncanakan sebesar Rp2.696.400.000,00.
 - b) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD direncanakan sebesar Rp377.496.000,00.
 - c) Belanja Tunjangan Beras DPRD direncanakan sebesar Rp438.238.920,00.
 - d) Belanja Uang Paket DPRD direncanakan sebesar Rp231.120.000,00.
 - e) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD direncanakan sebesar Rp3.909.780.000,00.
 - f) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD direncanakan sebesar Rp314.766.000,00.
 - g) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD direncanakan sebesar Rp420.471.000,00.
 - h) Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp15.300.000.000,00.
 - i) Belanja Tunjangan Reses DPRD direncanakan sebesar Rp3.825.000.000,00.
 - j) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp424.375.550,00.
 - k) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp24.433.050.000,00.
 - l) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD direncanakan sebesar Rp17.472.000.000,00.
 - m) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD direncanakan sebesar Rp1.155.600.000,00.

- (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e direncanakan sebesar Rp2.835.840.285,00. yang terdiri atas:
- a) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp75.600.000,00.
 - b) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp10.584.000,00.
 - c) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp136.080.000,00.
 - d) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp8.111.040,00.
 - e) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp5.203.618,00.
 - f) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp261.627,00.
 - g) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar Rp100.000.000,00.
 - h) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp250.000.000,00.
 - i) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp250.000.000,00.
 - j) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00.
- (5) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f direncanakan sebesar Rp7.836.746.184,00. yang terdiri atas:
- a) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp432.000.000,00.
 - b) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp7.404.746.184,00.
- (6) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g direncanakan sebesar Rp86.771.735.000,00. yang terdiri atas:
- a) Belanja Pegawai BOS direncanakan sebesar Rp86.771.735.000,00.
- (7) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h direncanakan sebesar Rp105.687.818.000,00. yang terdiri atas:
- a) Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp105.687.818.000,00.

Pasal 16

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat huruf b direncanakan sebesar Rp2.011.908.858.947,28 yang terdiri atas:

- a) Belanja Barang direncanakan sebesar Rp476.306.699.821,63
- b) Belanja Jasa direncanakan sebesar Rp723.391.116.006,50
- c) Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp156.156.993.190,15
- d) Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp222.502.919.366,00.
- e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp48.893.333.000,00.
- f) Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp192.219.429.840,00.
- g) Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp192.438.367.723,00.

Pasal 17

Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp476.306.699.821,63 yang terdiri atas:

- a) Belanja Barang Pakai Habis direncanakan sebesar Rp465.642.153.761,63
- b) Belanja Barang Tak Pakai Habis direncanakan sebesar Rp188.466.090,00.
- c) Belanja Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi direncanakan sebesar Rp10.476.080.000,00.

Pasal 18

(1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp723.391.116.006,50 yang terdiri atas:

- a) Belanja Jasa Kantor direncanakan sebesar Rp298.018.940.728,50
- b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi direncanakan sebesar Rp184.837.629.214,00.
- c) Belanja Sewa Tanah direncanakan sebesar Rp486.000.000,00.
- d) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp69.996.875.500,00.
- e) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp53.910.328,00.
- f) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi direncanakan sebesar Rp3.000.000,-
- g) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp218.600.000,00.
- h) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi direncanakan sebesar Rp82.701.085.764,00.
- i) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi direncanakan sebesar Rp15.003.637.000,00.
- j) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) direncanakan sebesar Rp144.575.000,00.
- k) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS direncanakan sebesar Rp557.100.000,00.
- l) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan direncanakan sebesar Rp17.513.344.800,00.

Pasal 19

Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan sebesar Rp156.156.993.190,15 yang terdiri atas:

- a) Belanja Pemeliharaan Tanah direncanakan sebesar Rp62.000.000,00.
- b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp42.483.015.149,00.
- c) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp24.797.454.254,15
- d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi direncanakan sebesar Rp88.478.564.787,00.
- e) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp263.959.000,00.
- f) Belanja Pemeliharaan Aset tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp72.000.000,-

Pasal 20

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d direncanakan sebesar Rp222.502.919.366,00. yang terdiri atas:

- a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp220.658.055.366,00. -

- b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri direncanakan sebesar Rp1.844.864.000,00.

Pasal 21

Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e direncanakan sebesar Rp48.893.333.000,00. yang terdiri atas:

- a) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp12.070.258.200,00.
- b) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp36.823.074.800,00.

Pasal 22

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f direncanakan sebesar Rp192.219.429.840,00. yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp192.219.429.840,00.

Pasal 23

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g direncanakan sebesar Rp192.438.367.723,00. yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp192.438.367.723,00.

Pasal 24

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 25

Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 26

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp846.615.926.797,00. yang terdiri atas:

- a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp396.099.898.390,00.
- b) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp10.799.928.390,00.
- c) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp246.148.929.207,00.
- d) Belanja Hibah Dana BOS direncanakan sebesar Rp194.843.760.000,00.
- e) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp9.523.339.200,00.

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.130.190.000,00. yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp4.580.190.000,00. yang diuraikan:

- a) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu direncanakan sebesar Rp4.320.000.000,00.
- b) Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu direncanakan sebesar Rp260.190.000,00.
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga direncanakan sebesar Rp550.000.000,00.

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp1.182.958.401.541,33 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp0,00.
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp117.920.599.725,00.
 - 1) Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp3.703.706.100,00.
 - 2) Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp3.731.852.000,00.
 - 3) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur direncanakan sebesar Rp81.139.000,00.
 - 4) Belanja Modal Alat Pertanian direncanakan sebesar Rp510.000.000,00.
 - 5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp22.220.200.010,00.
 - 6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar direncanakan sebesar Rp488.459.000,00.
 - 7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp3.718.696.000,00.
 - 8) Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp19.739.294.000,00.
 - 9) Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar Rp16.628.715.200,00.
 - 10) Belanja Modal Alat Eksplorasi direncanakan sebesar Rp132.930.000,00.
 - 11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian direncanakan sebesar Rp200.000.000,00.
 - 12) Belanja Modal Rambu-Rambu direncanakan sebesar Rp529.161.000,00.
 - 13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS direncanakan sebesar Rp27.369.638.638,00.
 - 14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp18.866.808.777,00.
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp266.472.789.354,00. terdiri atas:
 - 1) Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp253.837.714.754,00.
 - 2) Belanja Modal Monumen direncanakan sebesar Rp44.146.000,00.
 - 3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp2.423.508.600,00.
 - 4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp10.167.420.000,00.
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi direncanakan sebesar Rp776.122.259.940,33 terdiri atas:
 - 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp708.941.701.940,33
 - 2) Belanja Modal Bangunan Air direncanakan sebesar Rp67.092.376.000,00.
 - 3) Belanja Modal Instalasi direncanakan sebesar Rp20.000.000,00.
 - 4) Belanja Modal Jaringan direncanakan sebesar Rp38.182.000,00.

- 5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD direncanakan sebesar Rp30.000.000,00.
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp22.064.752.522,00. terdiri atas:
- 1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar Rp306.916.000,00.
 - 2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga direncanakan sebesar Rp220.000.000,00.
 - 3) Belanja Modal Hewan direncanakan sebesar Rp0,00.
 - 4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS direncanakan sebesar Rp21.537.936.522,00.
- f. Belanja Modal Aset Lainnya direncanakan sebesar Rp378.000.000,00. terdiri atas Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp378.000.000,00.

Pasal 29

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp32.472.500.000,00. yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp32.472.500.000,00.

Pasal 30

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp1.753.498.643.192,00. yang terdiri atas:

- a) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten direncanakan sebesar Rp1.507.532.329.168,63
- b) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota direncanakan sebesar Rp245.966.314.024,00.

Pasal 31

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 32

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a direncanakan sebesar Rp99.666.494.000,00. terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.

Pasal 33

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp108.275.140.000,00. terdiri atas Penyertaan Modal Daerah yang diuraikan pada Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 34

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Uang;
4. Lampiran III.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran IV.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Uang;
6. Lampiran IV.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Barang;
7. Lampiran V.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum;
8. Lampiran V.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus;
9. Lampiran VI.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Kabupaten;
10. Lampiran VI.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Kota;
11. Lampiran VI.C Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Desa;

Pasal 35

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 36

Pelaksanaan Penjabaran APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 - 12 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 - 12 - 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 54.



PROVINSI LAMPUNG

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.936.497.456.098,42
4.1.01	Pajak Daerah	3.344.116.899.379,00
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.000.000.000.000,00
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	19.751.930.000,00
4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	18.650.000.000,00
4.1.01.01.01.0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	282.895.000,00
4.1.01.01.01.0003	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat	15.385.000,00
4.1.01.01.01.0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	803.650.000,00
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	84.205.000.000,00
4.1.01.01.02.0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	83.357.500.000,00
4.1.01.01.02.0003	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat	25.500.000,00
4.1.01.01.02.0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	822.000.000,00
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	415.088.375.000,00
4.1.01.01.03.0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	412.400.000.000,00
4.1.01.01.03.0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	103.125.000,00
4.1.01.01.03.0003	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat	10.250.000,00
4.1.01.01.03.0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	2.575.000.000,00
4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus	2.417.675.000,00
4.1.01.01.04.0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	1.585.500.000,00
4.1.01.01.04.0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	622.150.000,00
4.1.01.01.04.0003	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat	15.300.000,00
4.1.01.01.04.0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	194.725.000,00
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	905.571.000,00
4.1.01.01.05.0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	308.200.000,00
4.1.01.01.05.0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	569.170.000,00
4.1.01.01.05.0003	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat	5.125.000,00
4.1.01.01.05.0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	23.076.000,00
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	81.058.975.000,00
4.1.01.01.06.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	80.120.000.000,00
4.1.01.01.06.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	223.400.000,00
4.1.01.01.06.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Pusat	15.375.000,00
4.1.01.01.06.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	700.200.000,00
4.1.01.01.07	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	100.815.881.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.01.07.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	66.450.000.000,00
4.1.01.01.07.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	34.034.500.000,00
4.1.01.01.07.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat	10.256.000,00
4.1.01.01.07.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	321.125.000,00
4.1.01.01.08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	73.764.251.000,00
4.1.01.01.08.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	28.170.700.000,00
4.1.01.01.08.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	45.526.300.000,00
4.1.01.01.08.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat	5.175.000,00
4.1.01.01.08.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	62.076.000,00
4.1.01.01.09	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	1.827.595.000,00
4.1.01.01.09.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	1.812.500.000,00
4.1.01.01.09.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum	770.000,00
4.1.01.01.09.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Pusat	1.025.000,00
4.1.01.01.09.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	13.300.000,00
4.1.01.01.10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	220.003.782.000,00
4.1.01.01.10.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	219.080.000.000,00
4.1.01.01.10.0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat	10.255.000,00
4.1.01.01.10.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	913.527.000,00
4.1.01.01.11	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	145.090.000,00
4.1.01.01.11.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	126.850.000,00
4.1.01.01.11.0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat	515.000,00
4.1.01.01.11.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	17.725.000,00
4.1.01.01.14	PKB-Mobil Roda Tiga	15.875.000,00
4.1.01.01.14.0001	PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi	14.835.000,00
4.1.01.01.14.0003	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat	520.000,00
4.1.01.01.14.0004	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah	520.000,00
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	710.000.000.000,00
4.1.01.02.01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	2.859.000.000,00
4.1.01.02.01.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	2.859.000.000,00
4.1.01.02.02	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	57.250.000.000,00
4.1.01.02.02.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	57.250.000.000,00
4.1.01.02.03	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	241.900.000.000,00
4.1.01.02.03.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	241.900.000.000,00
4.1.01.02.04	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	1.656.000.000,00
4.1.01.02.04.0001	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	1.656.000.000,00
4.1.01.02.05	BBNKB-Mobil Bus-Bus	546.900.000,00
4.1.01.02.05.0001	BBNKB-Mobil Bus-Bus	546.900.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.02.06	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	74.632.700.000,00
4.1.01.02.06.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	74.632.700.000,00
4.1.01.02.07	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	28.895.000.000,00
4.1.01.02.07.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	28.895.000.000,00
4.1.01.02.08	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	25.843.300.000,00
4.1.01.02.08.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	25.843.300.000,00
4.1.01.02.09	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	3.775.300.000,00
4.1.01.02.09.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	3.775.300.000,00
4.1.01.02.10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	270.142.600.000,00
4.1.01.02.10.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	270.142.600.000,00
4.1.01.02.11	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	2.333.500.000,00
4.1.01.02.11.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	2.333.500.000,00
4.1.01.02.14	BBNKB-Mobil Roda Tiga	165.700.000,00
4.1.01.02.14.0001	BBNKB-Mobil Roda Tiga	165.700.000,00
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	890.000.000.000,00
4.1.01.03.01	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	461.499.313.869,00
4.1.01.03.01.0001	PBBKB Bahan Bakar Bensin	461.499.313.869,00
4.1.01.03.02	PBBKB-Bahan Bakar Solar	428.500.686.131,00
4.1.01.03.02.0001	PBBKB Bahan Bakar Solar	428.500.686.131,00
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	7.500.000.000,00
4.1.01.04.01	Pajak Air Permukaan	7.500.000.000,00
4.1.01.04.01.0001	Pajak Air Permukaan	7.500.000.000,00
4.1.01.05	Pajak Rokok	735.616.899.379,00
4.1.01.05.01	Pajak Rokok	735.616.899.379,00
4.1.01.05.01.0001	Pajak Rokok	735.616.899.379,00
4.1.01.17	Pajak Alat Berat	1.000.000.000,00
4.1.01.17.01	Pajak Alat Berat	1.000.000.000,00
4.1.01.17.01.0001	Pajak Alat Berat	1.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	341.156.842.200,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	323.614.698.180,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	318.124.283.680,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	317.724.283.680,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	400.000.000,00
4.1.02.01.12	Retribusi Pelayanan Pendidikan	5.490.414.500,00
4.1.02.01.12.0003	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	5.490.414.500,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	17.447.144.020,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	15.019.855.730,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.794.205.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	58.375.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	9.560.635.480,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	1.690.392.250,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	916.248.000,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	378.000.000,00
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	378.000.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	510.605.650,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	510.605.650,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	74.000.000,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	74.000.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	335.163.240,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	335.163.240,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.129.519.400,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	391.653.400,00
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	439.866.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih ikan	158.000.000,00
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	140.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	95.000.000,00
4.1.02.03.05	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	5.000.000,00
4.1.02.03.05.0003	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu	5.000.000,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	90.000.000,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	90.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	584.820.361.218,42
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	584.820.361.218,42
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	149.703.861.218,42
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	149.703.861.218,42
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	435.116.500.000,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	435.116.500.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	666.403.353.301,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	595.243.000.000,00
4.1.04.01.01	Hasil Penjualan Tanah	595.000.000.000,00
4.1.04.01.01.0002	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	595.000.000.000,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	37.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.01.02.0031	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	37.000.000,00
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	153.000.000,00
4.1.04.01.03.0005	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	153.000.000,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	53.000.000,00
4.1.04.01.08.0002	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	53.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	28.782.362.007,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	28.700.401.324,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	28.700.401.324,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	81.960.683,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	81.960.683,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	194.351.033,00
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	194.351.033,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	194.351.033,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	422.953.760,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	422.953.760,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	422.953.760,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	24.378.412.782,00
4.1.04.12.01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	23.293.642.782,00
4.1.04.12.01.0015	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	480.002.304,00
4.1.04.12.01.0019	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	1.952.672.284,00
4.1.04.12.01.0023	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	9.289.733.446,00
4.1.04.12.01.0027	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	71.265.512,00
4.1.04.12.01.0031	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	17.377.360,00
4.1.04.12.01.0035	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	2.142.021.372,00
4.1.04.12.01.0040	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	1.891.970.357,00
4.1.04.12.01.0044	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	2.927.890.000,00
4.1.04.12.01.0048	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum	31.189.895,00
4.1.04.12.01.0051	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	4.482.279.505,00
4.1.04.12.01.0055	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	2.429.137,00
4.1.04.12.01.0064	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum	4.509.410,00
4.1.04.12.01.0068	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Umum	302.200,00
4.1.04.12.02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	980.920.000,00
4.1.04.12.02.0001	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	4.543.755,00
4.1.04.12.02.0002	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	104.540.510,00
4.1.04.12.02.0003	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	342.481.605,00
4.1.04.12.02.0004	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus	3.688.555,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.12.02.0005	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus	1.200.000,00
4.1.04.12.02.0006	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	139.205.285,00
4.1.04.12.02.0007	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	90.693.280,00
4.1.04.12.02.0008	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	102.048.025,00
4.1.04.12.02.0009	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	7.878.877,00
4.1.04.12.02.0010	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	182.316.718,00
4.1.04.12.02.0011	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	1.523.390,00
4.1.04.12.02.0014	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga	800.000,00
4.1.04.12.03	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	100.000.000,00
4.1.04.12.03.0002	Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Solar	100.000.000,00
4.1.04.12.04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	3.850.000,00
4.1.04.12.04.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	3.850.000,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	10.000.000,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	10.000.000,00
4.1.04.13.02.0018	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat	10.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	17.372.273.719,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	204.486.271,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	204.486.271,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	17.167.787.448,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	2.351.215.253,00
4.1.04.15.08.0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14.816.572.195,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.391.919.009.597,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.354.664.317.597,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	3.339.582.362.597,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	160.121.214.597,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	21.760.959.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	79.457.652.571,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	7.664.232.656,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.270.693.842,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	16.526.444.781,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	15.524.022.073,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	17.855.589.408,00
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	61.620.266,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	2.041.221.164.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	2.041.221.164.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	267.357.679.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.03.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	84.895.521.000,00
4.2.01.01.03.0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	2.089.191.000,00
4.2.01.01.03.0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	114.132.390.000,00
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	4.500.000.000,00
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	7.884.512.000,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	7.896.091.000,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	11.490.366.000,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	7.402.158.000,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	12.222.953.000,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	14.844.497.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	870.882.305.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	512.420.000.000,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	10.322.500.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	324.027.455.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.927.161.000,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	440.695.000,00
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	3.500.000.000,00
4.2.01.01.04.0010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	2.000.000.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	9.659.617.000,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	4.851.677.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	1.327.200.000,00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	15.081.955.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	15.081.955.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	15.081.955.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	37.254.692.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	37.254.692.000,00
4.2.02.02.04	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	37.254.692.000,00
4.2.02.02.04.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	37.254.692.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.786.659.735,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.786.659.735,00
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	3.673.080.000,00
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	3.673.080.000,00
4.3.01.04.01.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	3.673.080.000,00
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	10.113.579.735,00
4.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	10.113.579.735,00
4.3.01.05.01.0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	10.113.579.735,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Pendapatan	8.342.203.125.430,42
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	5.364.664.934.696,46
5.1.01	Belanja Pegawai	2.501.009.958.952,18
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.446.398.720.098,18
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.106.699.572.131,26
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	787.720.076.007,26
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	318.979.496.124,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	106.436.164.159,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	84.328.032.561,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	22.108.131.598,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	12.274.331.980,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	12.274.331.980,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	70.228.833.967,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	66.861.502.972,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3.367.330.995,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	16.023.126.527,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	13.551.592.519,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.471.534.008,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	54.986.096.061,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	48.282.158.202,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.703.937.859,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.545.684.503,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.542.047.485,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.003.637.018,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	7.439.022.398,92
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	7.428.707.171,27
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	10.315.227,65
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	57.555.000.000,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	57.155.000.000,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	400.000.000,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.740.000.000,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.700.000.000,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	40.000.000,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	5.065.000.000,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.000.000.000,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	65.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.12	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	4.405.888.371,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	4.405.888.371,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	358.380.979.541,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	355.647.420.649,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	343.494.303.596,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	12.153.117.053,00
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	132.025.000,00
5.1.01.02.02.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	132.025.000,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.522.013.892,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.522.013.892,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.079.520.000,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.079.520.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	422.099.822.374,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	78.353.963.080,00
5.1.01.03.01.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	31.368.922.211,00
5.1.01.03.01.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	17.434.230.721,00
5.1.01.03.01.0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	29.247.999.719,00
5.1.01.03.01.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	302.810.429,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	324.027.455.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	324.027.455.000,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	440.695.000,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	440.695.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.927.161.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.927.161.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	17.350.548.294,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	15.457.128.294,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.777.860.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	115.560.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	70.998.297.470,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	2.696.400.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	2.696.400.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	377.496.000,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	377.496.000,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	438.238.920,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	438.238.920,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	231.120.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	231.120.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	3.909.780.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	3.909.780.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	314.766.000,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	314.766.000,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	420.471.000,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	420.471.000,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	15.300.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	15.300.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	3.825.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	3.825.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	424.375.550,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	424.375.550,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	24.433.050.000,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	360.000.000,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	360.000.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	58.650.000,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	23.654.400.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	17.472.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	17.472.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	1.155.600.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	1.155.600.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.835.840.285,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.584.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.584.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.111.040,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.111.040,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.203.618,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.203.618,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	261.627,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	261.627,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	100.000.000,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	100.000.000,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	250.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	250.000.000,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	250.000.000,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	250.000.000,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	2.000.000.000,00
5.1.01.05.10.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH	661.752.548,00
5.1.01.05.10.0002	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	643.292.440,00
5.1.01.05.10.0003	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	689.961.415,00
5.1.01.05.10.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	4.993.597,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	7.836.746.184,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	432.000.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	432.000.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	7.404.746.184,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	7.404.746.184,00
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	86.771.735.000,00
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	86.771.735.000,00
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	86.771.735.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	105.687.818.000,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	105.687.818.000,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	105.687.818.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.011.908.858.947,28
5.1.02.01	Belanja Barang	476.306.699.821,63
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	465.642.153.731,63
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.532.900.900,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	15.180.668.800,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.986.489.470,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	2.094.787.900,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	632.026.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	94.036.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	50.818.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	124.000.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.888.079.039,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	38.133.000,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	48.694.000,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	55.851.700,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	93.700.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	42.418.669.590,96

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.116.010.442,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	95.703.282.660,70
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	585.996.000,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	251.952.800,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.170.427.500,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.540.950.600,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.765.020.194,11
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	520.519.200,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	519.652.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	7.428.426.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.375.283.896,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.107.197.428,86
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	8.848.848.803,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	13.227.201.650,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	143.125.579.360,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	1.509.300.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	835.022.250,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	73.466.694.547,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.103.485.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	120.000.000,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	4.671.346.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	280.468.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	3.556.052.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.800.571.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	400.000.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	1.453.500.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	102.500.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	809.885.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	36.000.000,00
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	141.100.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	180.265.000,00
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	3.276.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	850.000.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.544.500.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	2.252.986.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	188.466.090,00
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	155.513.090,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.02.0009	Belanja Pipa-Pipa Baja	14.188.000,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	18.765.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	10.476.080.000,00
5.1.02.01.04.0045	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	8.036.000,00
5.1.02.01.04.0116	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	25.321.000,00
5.1.02.01.04.0118	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	21.542.000,00
5.1.02.01.04.0121	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	119.574.000,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	52.288.000,00
5.1.02.01.04.0124	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	83.133.000,00
5.1.02.01.04.0131	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	3.500.000,00
5.1.02.01.04.0132	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	8.793.000,00
5.1.02.01.04.0133	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	61.662.000,00
5.1.02.01.04.0204	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	9.384.512.000,00
5.1.02.01.04.0406	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	410.600.000,00
5.1.02.01.04.0510	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	197.119.000,00
5.1.02.01.04.0699	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	50.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	723.391.116.006,50
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	298.018.940.728,50
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	38.630.502.100,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.822.474.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	133.200.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.270.370.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	36.400.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	670.474.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	247.850.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.798.800.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	4.617.640.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.530.686.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	1.012.102.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	880.200.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	163.812.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	574.885.980,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	653.714.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.936.202.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	99.550.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	628.400.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	13.974.434.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.521.622.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	99.725.794.564,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	20.686.576.300,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	10.160.835.880,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.481.990.400,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	70.835.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	54.563.800,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	33.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	87.430.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	20.130.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	3.443.093.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	11.537.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	543.613.000,00
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	96.250.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	873.669.800,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	5.930.789.000,50
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	306.191.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	430.009.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	259.370.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	90.360.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	694.440.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	72.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	29.224.222.400,00
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	69.600.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1.418.091.329,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	677.241.320,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	25.851.319.455,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.485.645.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	10.567.440.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	141.827.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	27.575.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.427.499.200,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	415.825.600,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	435.858.600,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	184.837.629.214,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	95.271.624.000,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	82.894.297.514,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.884.040.000,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	787.667.700,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	486.000.000,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	355.000.000,00
5.1.02.02.03.0014	Belanja Sewa Tanah Pertanian	9.000.000,00
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	122.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	69.996.875.500,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	57.000.000,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	2.996.880.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.072.186.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.442.590.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	162.576.000,00
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	34.164.000,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.943.080.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	6.000.000,00
5.1.02.02.04.0057	Belanja Sewa Kapal Terbang	37.229.500.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	5.393.699.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	124.540.000,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	29.610.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	14.400.000,00
5.1.02.02.04.0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	3.000.000,00
5.1.02.02.04.0130	Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	3.633.750.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	309.068.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	59.000.000,00
5.1.02.02.04.0135	Belanja Sewa Peralatan Cetak	15.000.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	61.015.000,00
5.1.02.02.04.0141	Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio VHF	6.000.000,00
5.1.02.02.04.0202	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	107.500.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	1.078.306.000,00
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	151.250.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.04.0407	Belanja Sewa Peralatan Mainframe	617.135.000,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	2.906.268.000,00
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	26.158.500,00
5.1.02.02.04.0416	Belanja Sewa Elektronik/Electric	517.200.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	53.910.328.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.024.480.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	31.143.215.000,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	70.000.000,00
5.1.02.02.05.0018	Belanja Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	12.000.000,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	212.900.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	269.800.000,00
5.1.02.02.05.0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	133.150.000,00
5.1.02.02.05.0033	Belanja Sewa Bangunan Parkir	6.750.000,00
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	286.775.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	20.751.258.000,00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.000.000,00
5.1.02.02.06.0103	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	3.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	218.600.000,00
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	107.000.000,00
5.1.02.02.07.0021	Belanja Sewa Musik Lainnya	6.000.000,00
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	20.000.000,00
5.1.02.02.07.0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	85.600.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	82.701.085.764,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	8.808.085.000,00
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	50.000.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	718.770.000,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	2.967.000.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	18.843.999.600,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	9.238.787.784,00
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	10.229.000,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	8.000.000.000,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	5.323.856.280,00
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	999.000.000,00
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	1.076.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.309.000.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	9.125.135.000,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	200.000.000,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	420.000.000,00
5.1.02.02.08.0022	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	7.252.000.000,00
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	350.000.000,00
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	12.000.000,00
5.1.02.02.08.0031	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal	4.653.280.000,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.995.977.100,00
5.1.02.02.08.0034	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	1.047.966.000,00
5.1.02.02.08.0036	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan	300.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	15.003.637.000,00
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	355.000.000,00
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	690.000.000,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	99.992.000,00
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	277.000.000,00
5.1.02.02.09.0005	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi	280.000.000,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	180.000.000,00
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	75.000.000,00
5.1.02.02.09.0009	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	75.000.000,00
5.1.02.02.09.0010	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Rekayasa Industri	119.512.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	372.474.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	7.524.520.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	4.655.139.000,00
5.1.02.02.09.0019	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata	300.000.000,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	144.575.000,00
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	144.575.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	557.100.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	50.700.000,00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	506.400.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	17.513.344.800,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.281.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	2.410.673.800,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	5.097.990.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	4.400.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	156.156.993.190,15
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	62.000.000,00
5.1.02.03.01.0018	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir	62.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	42.483.015.149,00
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	64.737.000,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	64.935.000,00
5.1.02.03.02.0006	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	52.902.000,00
5.1.02.03.02.0007	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	126.207.000,00
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	74.925.000,00
5.1.02.03.02.0016	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik	111.440.000,00
5.1.02.03.02.0018	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	20.000.000,00
5.1.02.03.02.0021	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor	84.240.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	174.030.000,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	25.000.000,00
5.1.02.03.02.0025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	24.984.000,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	14.215.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	25.493.250.400,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.444.858.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	385.050.000,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	960.000,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	400.550.000,00
5.1.02.03.02.0048	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	20.240.000,00
5.1.02.03.02.0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	19.500.000,00
5.1.02.03.02.0107	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	39.500.000,00
5.1.02.03.02.0111	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	39.000.000,00
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	32.460.000,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	1.861.016.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.941.270.700,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	896.460.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	53.517.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.455.623.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0122	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	5.065.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.930.000,00
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	131.183.899,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	12.000.000,00
5.1.02.03.02.0135	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	55.200.000,00
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	60.000.000,00
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.590.000,00
5.1.02.03.02.0244	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	56.150.000,00
5.1.02.03.02.0245	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	45.650.000,00
5.1.02.03.02.0278	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	25.860.000,00
5.1.02.03.02.0293	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	58.215.150,00
5.1.02.03.02.0367	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	30.260.000,00
5.1.02.03.02.0375	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat	52.538.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	898.143.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	136.910.000,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	242.703.000,00
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	89.578.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	589.505.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	131.604.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	815.060.000,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	93.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	24.797.454.254,15
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	19.460.201.454,15
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	1.435.427.100,00
5.1.02.03.03.0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	38.740.000,00
5.1.02.03.03.0005	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	161.442.000,00
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	154.080.000,00
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.018.828.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	562.632.000,00
5.1.02.03.03.0013	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	6.800.000,00
5.1.02.03.03.0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	102.000.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	19.584.000,00
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.125.000.000,00
5.1.02.03.03.0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	157.872.000,00
5.1.02.03.03.0042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	554.847.700,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	88.478.564.787,00
5.1.02.03.04.0002	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	59.990.428.750,00
5.1.02.03.04.0012	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi	4.436.758.000,00
5.1.02.03.04.0024	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	5.130.685.000,00
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	14.219.989.537,00
5.1.02.03.04.0047	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya	3.716.500.000,00
5.1.02.03.04.0068	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.960.000,00
5.1.02.03.04.0075	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	51.712.000,00
5.1.02.03.04.0087	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	180.714.000,00
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	130.722.000,00
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	2.924.000,00
5.1.02.03.04.0125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	100.032.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	344.139.500,00
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	171.000.000,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	263.959.000,00
5.1.02.03.05.0033	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	150.000.000,00
5.1.02.03.05.0037	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	113.959.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	72.000.000,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	72.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	222.502.919.366,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	220.658.055.366,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	154.515.263.909,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	834.268.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.941.621.400,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	25.730.557.057,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	19.636.345.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.844.864.000,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	1.844.864.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	48.893.333.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.070.258.200,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.684.774.200,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	2.710.184.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	6.675.300.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	36.823.074.800,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	32.667.397.800,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	4.155.677.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	192.219.429.840,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	192.219.429.840,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	192.219.429.840,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	192.438.367.723,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	192.438.367.723,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	192.438.367.723,00
5.1.05	Belanja Hibah	846.615.926.797,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	396.099.898.390,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	385.299.970.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	385.299.970.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	10.799.928.390,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	10.799.928.390,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	246.148.929.207,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	144.824.793.010,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	64.302.792.000,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	80.522.001.010,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	24.733.309.600,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.248.725.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	18.627.349.600,00
5.1.05.05.02.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.857.235.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	76.390.848.937,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	10.230.000.000,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	66.160.848.937,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	199.977.660,00
5.1.05.05.06.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	199.977.660,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	194.843.760.000,00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	191.952.770.000,00
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	191.952.770.000,00
5.1.05.06.04	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	2.890.990.000,00
5.1.05.06.04.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	2.890.990.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	9.523.339.200,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	9.523.339.200,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	9.523.339.200,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.130.190.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	4.580.190.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	4.320.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	4.320.000.000,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	260.190.000,00
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	260.190.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	550.000.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	550.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	550.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	1.182.958.401.541,33
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.920.599.725,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	3.703.706.100,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	3.090.000.000,00
5.2.02.01.01.0001	Belanja Modal Tractor	450.000.000,00
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	2.640.000.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	613.706.100,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	152.600.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	53.124.600,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	407.981.500,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.731.852.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.731.852.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.015.668.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	716.184.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	81.139.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	17.845.000,00
5.2.02.03.01.0008	Belanja Modal Peralatan Las	2.900.000,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	14.945.000,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	5.660.000,00
5.2.02.03.02.0013	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	5.660.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	57.634.000,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	57.634.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	510.000.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	510.000.000,00
5.2.02.04.01.0007	Belanja Modal Alat Pasca Panen	510.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	22.220.200.010,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	5.782.997.100,00
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	6.162.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	688.510.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.088.325.100,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	14.617.154.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	9.125.531.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	16.653.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	3.027.110.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	22.852.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.420.313.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	4.695.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.820.048.910,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	510.961.910,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	168.870.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	333.556.000,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	69.410.000,00
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	27.300.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	220.000.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	489.951.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	488.459.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	412.640.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	172.922.000,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	29.819.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	209.899.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	75.819.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	75.819.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.718.696.000,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	73.367.000,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	29.800.000,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	43.567.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	3.645.329.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	3.645.329.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	19.739.294.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.985.457.000,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	342.075.000,00
5.2.02.08.01.0012	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	1.400.000.000,00
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	106.560.000,00
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	136.822.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	16.988.001.000,00
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	931.500.000,00
5.2.02.08.03.0014	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	16.056.501.000,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	532.389.000,00
5.2.02.08.07.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	532.389.000,00
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	233.447.000,00
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	223.571.000,00
5.2.02.08.08.0015	Belanja Modal Photo and Film Equipment	9.876.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	16.628.715.200,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	9.021.231.200,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	493.600.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	3.261.784.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	5.265.847.200,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	7.607.484.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	37.676.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	86.417.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	7.483.391.000,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	132.930.000,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	132.930.000,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	132.930.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	200.000.000,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	200.000.000,00
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	200.000.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	529.161.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	529.161.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	529.161.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	27.369.638.638,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	27.369.638.638,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	27.369.638.638,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	18.866.808.777,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	18.866.808.777,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	18.866.808.777,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	266.472.789.354,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	253.837.714.754,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	253.437.745.394,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	74.436.730.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	697.891.040,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.319.983.390,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	103.288.213.200,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	48.489.665.590,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	265.320.000,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	5.683.800.000,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	10.495.576.899,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	7.280.992.475,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	479.572.800,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	399.969.360,00
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	399.969.360,00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	44.146.000,00
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	44.146.000,00
5.2.03.02.01.0004	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	44.146.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.423.508.600,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.423.508.600,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	2.381.508.600,00
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	42.000.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	10.167.420.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	10.167.420.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	10.167.420.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	776.122.259.940,33
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	708.941.701.940,33
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	668.526.272.540,33
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	648.302.854.335,33
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	3.200.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	17.023.418.205,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	40.415.429.400,00
5.2.04.01.02.0002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	33.879.466.872,00
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	6.535.962.528,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	67.092.376.000,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	23.657.497.000,00
5.2.04.02.01.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	100.000.000,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	23.557.497.000,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	43.434.879.000,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	361.726.000,00
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	43.073.151.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	20.000.000,00
5.2.04.03.09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	20.000.000,00
5.2.04.03.09.0001	Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir	20.000.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	38.182.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	38.182.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	38.182.000,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	30.000.000,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	30.000.000,00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	30.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.064.752.522,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	306.816.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	251.100.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	189.900.000,00
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	61.200.000,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	55.716.000,00
5.2.05.01.02.0003	Belanja Modal Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya	55.716.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	220.000.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	85.000.000,00
5.2.05.02.01.0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	85.000.000,00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	135.000.000,00
5.2.05.02.02.0002	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	135.000.000,00
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	0,00
5.2.05.03.02	Belanja Modal Ternak	0,00
5.2.05.03.02.0004	Belanja Modal Ternak Lainnya	0,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	21.537.936.522,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	21.537.936.522,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	21.537.936.522,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	378.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	378.000.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	378.000.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	78.000.000,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	50.000.000,00
5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	250.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	32.472.500.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	32.472.500.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	32.472.500.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	32.472.500.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	32.472.500.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	1.753.498.643.192,63
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.753.498.643.192,63
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.753.498.643.192,63
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	1.507.532.329.168,63
5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	1.507.532.329.168,63
5.4.01.01.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	245.966.314.024,00
5.4.01.01.02.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	245.966.314.024,00
	Jumlah Belanja	8.333.594.479.430,42
	Total Surplus/(Defisit)	8.608.646.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	99.666.494.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	99.666.494.000,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	99.666.494.000,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	99.666.494.000,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	99.666.494.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	108.275.140.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	108.275.140.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	108.275.140.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	108.275.140.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	108.275.140.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	108.275.140.000,00
	Pembiayaan Netto	-8.608.646.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

